

SEMAUN DALAM BAYANG-BAYANG PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1899-1923

Wahyu Wirawan

Ph.D. Candidate, Mahasiswa Nijmegen University, Belanda

ABSTRACT

The background of Semaun life between 1899-1923 is influenced by the hands of the Dutch colonial government power, either directly or indirectly. His father who worked as a stone breaker at the Railway Bureau economically place them as disadvantaged and exploited social groups. Because they are only used as cheap labor. In the stratification of society in East Java, Dutch East Indies in particular, the Semaun is categorized as abangan Islamic family which is in everyday social intercourse are socially marginalized. Politically, Semaun family is not counted, except within the framework of the political interests of rulers in achieving its goals. In the field of education, Semaun can achieve it despite the limitations.

Key words: Semaun, educational, economic,

social and political

ABSTRAK

Latar belakang kehidupan Semaun antara 1899-1923 dipengaruhi oleh tangan-tangan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayahnya yang bekerja sebagai pemecah batu di Jawatan Kereta Api Surabaya secara ekonomi menempatkannya pada golongan masyarakat kurang mampu dan tereksplorasi. Karena mereka hanya dijadikan tenaga kerja murah. Dalam stratifikasi masyarakat di Hindia Belanda khususnya Jawa Timur, keluarga Semaun masuk dalam kalangan Islam abangan yang dalam pergaulan sehari-hari termarginalisasi secara sosial. Secara politis, keluarga Semaun tidak masuk hitungan, kecuali dalam kerangka kepentingan politik penguasa dalam mencapai tujuannya. Dalam bidang pendidikan, Semaun dapat meraihnya walaupun dalam keterbatasan.

Kata kunci: Semaun, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

PENDAHULUAN

Diskusi dan pembelajaran yang berkembang selama ini, secara umum melihat komunisme sebagai hantu yang menakutkan. Ketakutan yang berlebihan menimbulkan sikap mental yang tidak kritis. Pandangan yang kurang kritis sengaja dibangun sehingga terus bersemi dan melembaga. Akibatnya walaupun rezim yang membangun tembok antikomunis sudah runtuh, namun bangunan mentalitasnya masih kokoh tegak berdiri.

Fondasi bangunan yang pertama

dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, pasca perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda 1926/1927 di bawah bendera gerakan komunis. "PKI sudah mati, dan tidak dapat bangkit kembali selama hampir dua puluh tahun. Sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak. Kira-kira 4.500 orang dijebloskan ke dalam penjara dan 1.308 orang dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul yang khusus dibangun pada tahun 1927" (M.C. Ricklefs, 2005: 272).

Genderang antikomunis ditabuh

dan dilestarikan sampai pemerintah kolonial Belanda berakhir. Gerakan antikomunis pada masa pemerintahan Soekarno juga ada namun, menilai gerakan antikomunis pada masa Soekarno tanpa melihat konteksnya yaitu pertunjukan aplikasi paradigma Perang Dingin terasa kurang tepat, kalau tidak boleh dikatakan tidak adil. Bahkan menilai Soekarno sebagai pengikut atau penganut ideologi Komunisme menunjukkan bahwa komentar tersebut sangat dangkal dan muatan politisnya begitu kental. Namun, Soekarno memberi tempat bagi pandangan dan ideologi tersebut merupakan suatu fakta. Karena menurut Soekarno bersatunya seluruh kekuatan revolusioner Indonesia merupakan syarat mutlak (*Een samenbundeling van alle revolutionaire krachten*) untuk membangun Indonesia.

Sikap antikomunis bersemi kembali dan disuarakan oleh pemerintah Soeharto. Pandangan tersebut dikembangkan atas *hipotesis* Yoga Sugomo, yang belum pasti kebenarannya tetapi pandangan Yoga Sugomo dijadikan senjata untuk meluluhlantahkan gerakan komunis di Indonesia (P.J. Suwarno, 2004: 92). Rezim Soeharto sudah tumbang sejak 1998 namun, tembok antikomunis sudah sangat tebal dan tinggi. Bahkan bangunan tersebut masuk dalam mental generasi muda bangsa ketika pemerintah melalui guru sejarah mewajibkan setiap anak didiknya menonton film *Pengkhianatan G30S PKI* dan membuat resume atau laporan tentang kekejaman PKI (Kurun waktu masa Orde Baru).

Pada kesempatan kali ini tidak akan menyoroti tindakan pemerintah terhadap PKI, namun penulis coba mengemukakan latar belakang keadaan ekonomi, politik, sosial dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Semaun, baik sikap maupun tindakannya dalam bayang-bayang pemerin-

tah kolonial Belanda sehingga akhirnya memutuskan menjatuhkan pilihan politiknya pada Komunisme.

LATAR BELAKANG BIDANG SOSIAL

Sejak awal abad ke-16 di Jawa telah tumbuh tiga akar kekuatan yang akan menjadi golongan yang paling berpengaruh pada abad 19-20 (Geertz, 1981: ix). Kelompok pertama, kaum priyayi merupakan kelompok yang memegang kekuasaan. Sebagai kaum bangsawan pekerjaan mereka secara umum berpusat pada kantor-kantor dan secara kebudayaan berakar pada kebudayaan Jawa - Hindu. Pada dimensi yang lain, agama Islam sedang mengalami proses tumbuh dan berkembang. Perkembangan agama Islam diikuti pula dengan munculnya golongan baru yang dikenal sebagai kaum santri. Golongan santri ini berakar pada masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Kelompok ketiga, masyarakat pedesaan Jawa yang masih mendukung nilai-nilai kebudayaan zaman pra-Hindu yang dikenal sebagai abangan, (Soe Hok Gie, 1990: 47).

Dalam perkembangan selanjutnya, secara umum terjadi pertentangan antara kaum santri dan kaum priyayi. Kaum priyayi yang bersekutu dengan Belanda yang dianggap sebagai kaum kafir di kalangan masyarakat ortodoks. Adanya keinginan masyarakat Islam mengusir penjajah Belanda dari wilayah Hindia Belanda dapat dilihat dari beberapa perlawanan misalnya, Diponegoro dalam Perang Jawa (*Java Oorlog*). Diponegoro menentang campur tangan pihak Belanda dalam keraton Yogyakarta dan di sisi lain ada bangsawan yang secara instan menjadi kaya karena hasil penyewaan tanah. Ditambah dengan peliknya permasalahan sosial-ekonomi yang menimpa rakyat di

Yogyakarta (Carey, 2004: 45).

Kedatangan Belanda ke Nusantara secara langsung maupun tak langsung menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena nilai-nilai tradisional yang sudah mengakar kuat di Nusantara dikonfrontasikan dengan nilai-nilai modern yang dibawa Belanda, sehingga mulai muncul kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat. Terbentuknya kelas sosial baru akan melahirkan kesenjangan sosial, terutama antara orang-orang Eropa dengan penduduk lokal yang semakin mengerucut. Keadaan semacam ini menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan protes dan pemberontakan, sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan kaum pergerakan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat desa (Geertz, 1981 :485).

Penggunaan bahasa juga ditentukan berdasarkan status sosialnya. Bahasa Belanda digunakan oleh golongan elite dan kaum terdidik di Hindia Belanda. Disusul bahasa Melayu dan Jawa. Hampir semua informasi penting yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda ditulis dan dilaporkan dalam bahasa Belanda dan yang menggunakan bahasa Jawa porsinya kecil. Buktinya laporan pajak dan informasi soal pergerakan kaum bumiputera yang disampaikan residen kepada pejabat di atasnya pun ditulis dalam bahasa Belanda (Munasichin, 2005: 44).

Dominannya pengaruhnya Belanda berakibat pada kedudukan kepala daerah dalam lembaga tradisional. Kedudukan kepala-kepala daerah berangsur-angsur berkurang dan berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat Belanda, sehingga sektor-sektor yang berkaitan dengan produksi pertanian, tanah, maupun tenaga kerja diatur menurut sistem kolonial (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 148). Diskrimi-

nasi yang dilakukan penjajah Belanda kepada masyarakat Nusantara begitu nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pemisahan di dalam gerbong kereta api, di gedung bioskop, di gedung pertemuan dan dalam lingkungan pemukiman.

Di sebuah kota kecil, tepatnya di Tjurahmalang yang berada di sebelah barat Surabaya lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Semaun tahun 1899 (Soe Hok Gie, 1990: 52; Soewarsono, 2000). Semaun yang bukan berasal dari kaum priyayi, maka diskriminasi merupakan bagian dari hidupnya. Ayah Semaun bernama Prawiroatmodjo. Seorang buruh jawatan kereta api di Surabaya, tepatnya sebagai tukang pemecah batu.

Hidup sebagai buruh pemecah batu di jawatan kereta api seringkali mendapat perlakuan semena-mena dari atasan mereka yang berkebangsaan Belanda. Uniknya status sosial yang dimiliki Semaun berbeda dengan kebanyakan tokoh pergerakan abad ke-20 yang secara umum berasal dari kalangan priyayi. Status sosial keluarga yang rendah terbukti dengan tidak banyak diketahui orang perihal sejarah keluarga Semaun.

Keadaan keluarga yang status sosialnya rendah secara sosilogis sudah barang tentu mengalami segala bentuk diskriminasi yang ada dalam sistem kemasyarakatan di Hindia Belanda. Sebagai saksi dan korban dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan elite-elite lokal tidak serta merta membuat Semaun bergerak tetapi perasaan itu terus mempengaruhi jalan pikirannya sampai akhirnya memutuskan diri untuk bergerak demi perbaikan nasib buruh. Semaun merupakan bagian dari kaum tertindas yang termarginalkan.

LATAR BELAKANG BIDANG EKONOMI

Keadaan sosial ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda lebih banyak dikuasai satu pihak saja yaitu pemilik modal. Penyewa tanah kebanyakan terdiri atas orang Eropa. Sementara itu, kehidupan ekonomi lebih banyak memberikan keuntungan untuk kelas minoritas yang bernama bangsa Belanda, sedangkan rakyat Indonesia yang menjadi kelompok mayoritas di sistem masyarakat di Hindia Belanda hidupnya menderita, karena dieksploitasi (Sulistyo, 1995: 9).

Sebelum diberlakukannya politik etis, kehidupan rakyat Indonesia secara umum mengalami krisis dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berupa kopi, teh, kina dan sumber daya manusianya dijadikan alat untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dieksploitasi oleh Belanda antara lain digunakan untuk membayar hutang negeri Belanda pasca Perang Jawa dan Perang Paderi.

Revolusi Agraria yang dijalankan di Hindia Belanda lebih menitikberatkan pada sektor perkebunan. Di samping itu, revolusi agraria memberikan perubahan pada petani bumiputera yang diperkenalkan dengan sistem sewa tanah yang dinilai dengan uang. Sebelumnya sistem yang dianut oleh petani adalah sistem bagi hasil (Munasichin, 2005: 2).

Paham liberal memisahkan dengan tegas antara bidang ekonomi dan politik. Adanya campur tangan yang bersifat politis atas ekonomi tidak dapat dibenarkan. Bidang ekonomi merupakan bidang yang menjadi wewenang perseorangan, sedangkan politik merupakan wewenang pemerintah. Kaum liberal mengkritik atas kebijakan pemer-

intah dalam melakukan eksploitasi ekonomi dengan menggunakan sistem tanam paksa yang berlaku sejak 1830. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bukan menjadikan individu sebagai pelaksana ekonomi secara bebas melainkan pelaksana atas apa yang ditentukan pemerintah (Sulistyo, 1995:12).

Konsekuensi dari diberlakukannya politik kolonial liberal maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat dan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Agraria. Tujuan dari UU Agraria antara lain, melarang bangsa asing untuk membeli tanah penduduk. Penduduk diberikan sertifikat sebagai bukti jaminan atas hak kepemilikan atas tanah. UU Agraria secara prinsip mempertahankan pola tradisi lama yaitu, masyarakat komunal dengan tingkat perekonomian subsistensi. Dalam masyarakat komunal kekuasaan kepala desa sangat besar atas warga desanya, sehingga kekuasaan kepala desa ini sering dimanfaatkan para pemilik modal dan perkebunan. Pemanfaatan dalam hal negoisasi tanah sewaan, pengumpulan tenaga kerja, pengawasan pekerja sampai keamanan perkebunan. Bahkan pembangunan saluran irigasi, jembatan, dan jalan dapat dilaksanakan dengan melakukan kerja wajib. Jadi penjajahan memiliki perkakas baru yaitu, penguasa dan elite lokal (Suhartono, 1991: 123-130).

Revolusi agraria dimanfaatkan oleh sebagian elite Belanda yang ada di Hindia Belanda dan bekerja sama dengan para pemilik modal. Pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan dalih mensukseskan revolusi agraria, mereka menggerakkan bupati dan lurah untuk mengorganisasi petani agar bersedia menyewakan tanahnya secara kolektif kepada pengusaha perkebunan asing (Munasichin, 2005: 2).

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut memberikan pengaruh yang signifikan kepada rakyat. Buktinya pekerjaan mereka berubah dari petani yang menggarap tanahnya sendiri beralih menjadi buruh pabrik-pabrik gula. Harapan yang dinantikan ternyata berbanding terbalik, rakyat yang menjadi buruh kehidupannya semakin lama tambah sulit, bahkan di masyarakat mulai lahir kelas-kelas sosial baru. Konflik tak jarang terjadi antara pemilik modal dan kaum buruh. Sistem sewa tanah membuat masyarakat lokal mulai mengenal uang dan sistem kontrak.

Sistem sewa tanah pun melahirkan apa yang dikenal dengan kapitalisasi perkebunan (Suhartono, 1991: 97-100). Mengenai Jumlah modal Belanda, Semuan memberikan rinciannya (Yuliati, 2000:154).

untuk mengikuti kerja paksa. Bukan hanya itu saja, daerah-daerah produksi banyak dikuasai oleh Belanda sehingga menyulitkan bagi penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka (Poesponegoro dan Notosusanto, 1971:52).

Sewa tanah milik penduduk dan milik desa oleh kaum kapitalis bertujuan untuk mendapatkan untung yaitu dengan cara lahan sawah ditanami tebu. Penggarapan tanahnya dilakukan oleh petani yang diupah rendah (eksploitasi). Buruh tani tidak jarang mendapat pemaksaan dan pemerasan dari pemilik perkebunan dan kegiatan terus berjalan sampai tahun 1900 (Sulistyo, 1995: 25).

Perlakuan tidak adil seperti, pemaksaan, upah rendah, dan pemerasan, secara umum yang diperoleh oleh penduduk lokal terus terjadi (Onghokham,

Tabel 1. Jumlah Modal Belanda

Perusahaan	Jumlah Modal
Peroesahaan tanah	f. 606.763.000
Tambang arang	f. 151.000.000
Bank-bank pasar	f. 147.750.000
Spoor dan tram (particulier)	f. 93.355.000
Kapal	f. 89.457.000
Kantor dagang	f. 75.548.000
Jumlah	f.1.163.873.000

Banjir modal bukan untuk kemakmuran rakyat. Tanah milik petani yang telah disewakan kepada pemilik modal dihargai rendah. Keadaan ini membuat petani menyadari bahwa jumlah yang dibayarkan pemilik modal lebih rendah bila dibandingkan dengan penghasilan petani jika mereka menanam padi atau tanaman pangan lainnya (Shiraishi, 1997: 21).

Petani selain harus menanam tanaman ekspor, mereka digerakkan

2008). Eksploitasi semacam itu pun didapati pula di daerah sekitar tempat tinggal Semaun. Menurut Semaun betapa menderitanya kaum bumiputera yang berkerja sebagai buruh perkebunan milik kaum kapitalis yang diperlakukan secara tidak adil.

Koem boeroeh mendapat belandja moerah-moerahan sebab terpaksa, harga barang-barang keperluan selaloe naik-naik sadja, pemerin-

tah menambahi padjeg-padjegnja rakjat. Rakjat tambah miskin, ka-oem oeng Belanda dan perkakasnja (pemerintah) inilah jang perloe didjaga dengan mengoeati pendjagaan Hindia, dan bukan rakjat Hindia jang melarat itoe (*Sinar Hindia*, 7 September 1981, dikutip Dewi Yuliati, 2000: 155).

Di daerah Surabaya dan sekitarnya masih banyak terdapat tanah yang disewa oleh swasta asing. Bukan hanya itu saja, tuan tanah menjadi raja kecil yang dapat mengangkat dan memberhentikan lurah-lurah di daerah dan melakukan kerja rodi dengan memaksa penduduk.

Tanah penduduk yang sebelumnya berupa lahan sawah dirubah menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Perubahan fungsi lahan memicu kenaikan harga beras sebagai akibat kurangnya daerah pertanian yang menghasilkan beras untuk kebutuhan pangan. "Beras Siam berharga f.16 per pikul, beras Djawa No.1, f.16 per pikul, No.2, f.15 per pikul, dan No.3, f.14 per pikul." (*Sinar Hindia*, 14 Januari 1919, dikutip via Dewi Yuliati, 2000: 43). Dibandingkan dengan upah buruh harian per hari sekitar 50 sen dan kuli 30-40 sen. (Dewi Yuliati, 2000:162).

Mahalnya harga beras yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh menambah penderitaan rakyat. Bahkan gaji mereka sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (M.C. Ricklefs, 2005: 265). Berdasar pada perbandingan di atas maka dapat diketahui kalau gaji sehari sebagai buruh tidak cukup untuk membeli beras satu pikul, apalagi gaji kuli.

Semaun bukan anak priyayi. Ayahnya sebagai buruh pemecah batu membuat kehidupannya pas-pasan secara ekonomi kalau tidak boleh dikatakan kurang. Untuk makan dan me-

enuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit apalagi untuk sekolah. Dalam lingkup kepentingan ekonomi kolonial, Semaun dan keluarganya yang bekerja tidak lebih dari faktor produksi yang menguntungkan bagi pemenuhan kepentingan ekonomi kolonial. Karena pada waktu itu buruh dihargai rendah, kalau tidak boleh dikatakan dieksploitasi.

Dalam pemikiran Semaun perjuangan masyarakat lokal dalam bidang ekonomi akan berhasil dalam melawan dominasi kapitalisme melalui jalan yang disebutnya koperasi. Kaum buruh juga harus masuk dalam perkumpulan buruh agar mereka terlindungi dari kebijakan pemerintah kolonial yang tidak berpihak pada buruh.

LATAR BELAKANG BIDANG POLITIK

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda secara umum berorientasi pada ekonomi. Kebijakan ini terlihat sejak *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) masih memegang kekuasaan di Hindia Belanda, yaitu dengan cara memperlak para bupati dan raja sebagai alat dalam memperlancar usaha dagangnya. Kebijakan dari VOC digantikan oleh kebijakan pemerintah kolonial Inggris yang dipelopori oleh Raffles dan dikenal sebagai sistem sewa tanah. Dasar orientasi dari kebijakan pemerintahan Raffles tidak terlepas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kekuasaan Inggris di Hindia hanya berlangsung selama lima tahun tetapi dalam kurun waktu yang relatif singkat, Raffles mampu meletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Belanda mengambil alih kembali kekuasaan di Hindia Belanda dari Inggris ta-

hun 1816 (Poesponegoro dan Notosusanto, 1971: 89).

Raffles selain menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan yang modern, sistem sewa tanah juga menekankan pelaksanaan pemungutan sewa yang pada zaman VOC dilakukan dengan menggunakan sistem pajak. Sistem pajak yang dijalankan yaitu dengan cara mengharuskan penduduk lokal membayar dengan beras. Pajak ini dikenakan secara kolektif untuk seluruh desa yang berada di bawah pengawasan kepala desa. Kepala desa diberi wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan pada zaman sewa tanah, pajak tidak lagi dikenakan kepada desa secara keseluruhan melainkan dikenakan kepada perseorangan dengan jumlah berbeda yang disesuaikan dengan jumlah penghasilan.

Sistem sewa tanah juga menekankan pada pengenalan tanaman ekspor, namun dalam perkembangan selanjutnya sistem ini mengalami kegagalan. Kegagalan antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam memasarkan hasil tanaman ekspor kepada konsumen (Poesponegoro dan Notosusanto, 1971:94).

Sistem sewa tanah berlangsung sampai tahun 1830-an dan untuk menggantikan sistem sewa tanah pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*Cultuur Stelsel*) dan politik *Batig Saldo*. Politik *Batig Saldo* merupakan politik yang menghendaki pemasukan uang sebanyak-banyaknya dan pengeluaran seminimal mungkin. Hakekatnya politik *Batig Saldo* tidak kalah besar sumbangnya bagi kesengsaraan rakyat dan bukan hanya tertuju pada tanam paksa seperti yang dikemukakan peneliti selama ini. Namun, sistem tanam paksa merupakan sebuah sistem yang mengharuskan masyarakat Jawa membayar pajak dalam bentuk barang,

yaitu berupa hasil pertanian mereka dan bukan berupa uang seperti yang mereka lakukan pada masa sewa tanah (Poesponegoro dan Notosusanto, 1971:98). Sistem sewa tanah tidak berlangsung lama, sistem tersebut kemudian digantikan dengan sistem liberal atau yang lebih dikenal secara politis sebagai liberalisasi perkebunan yang mulai berjalan tahun 1860-an.

Sejak pertengahan abad ke-19 pengawasan dan penguasaan atas pulau Jawa berada di tangan Parlemen Belanda, sedangkan pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Urusan Jajahan yang juga menjadi anggota kabinet. Menteri Urusan Jajahan bertanggung jawab kepada Parlemen Belanda. Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik kolonial pemerintah sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dari partainya dan partai lain yang ada dalam kabinet. Dalam menjalankan tugas, Menteri Jajahan memiliki kantor urusan jajahan di Den Haag. Dalam kantor tersebut terdapat orang-orang yang sudah berpengalaman dengan wilayah jajahan (van Niel, 1984: 15).

Politik liberal yang mengusung liberalisasi perkebunan telah diberlakukan sejak tahun 1860-an. Sistem ini membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta asing untuk menanamkan modalnya di pulau Jawa. Pada tahun 1870 politik kolonial liberal mulai berjalan dengan lancar dan kebijakan ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Belanda. Karena ternyata kekayaan dari pulau Jawa tidak banyak yang mengalir ke kas pemerintah Belanda, tetapi mengalir ke kelas menengah Belanda yang masa itu ikut menguasai arus politik di negeri Belanda (van Niel, 1984:18).

Kebijakan politik kolonial liberal memberikan dampak bagi pertumbuhan

penduduk dan perkembangan sektor ekonomi yang banyak dikuasai oleh orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Mereka kebanyakan berasal dari golongan menengah yang telah mengenyam pendidikan dan membawa kebudayaan asalnya. Orang-orang Belanda mulai membentuk suatu komunitas baru di daerah perkotaan dan mulai mencetuskan ide-ide tentang urusan-urusan dalam kelompok mereka. Mereka mulai mengkritik kebijaksanaan kolonial di negara induk. Masyarakat Eropa yang baru tersebut ingin mengurus segala persoalan secara mandiri tanpa adanya pengawasan dari negara induk (Robert van Niel, 1984: 20).

Semaun yang hidup dalam sistem politik kolonial liberal dari pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk menyewa tanah yang digunakan untuk lahan perkebunan. Dalam perkembangan selanjutnya kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan politik kolonial liberal dinilai lebih baik. Namun, hakekatnya politik kolonial yang bersifat konvensional atau liberal sama saja, tujuannya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan bahkan dalam liberalisasi perkebunan eksploitasi lebih besar dan terseruktur dengan baik.

Langkah awal keterlibatan Semaun dalam bidang politik dapat ditelusuri dari keikutsertaan Semaun dalam organisasi Sarekat Islam *afdeeling* Surabaya tahun 1914, yang salah satu tujuannya meluruskan pemahaman Islam dan sebagai media gerakan politik lokal melawan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dinilai diskriminatif (Munasichin, 2005:63). Setelah ikut serta dalam CSI, Semaun dipercayakan untuk memimpin Sarekat Islam cabang Semarang yang gerakannya radikal dalam menentang politik kolonial Belanda. Selain menjadi pimpinan Sarekat Islam

Semarang, Semaun menjadi anggota *Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel* (VSTP).

Pada Desember 1920, Semaun menjadi Ketua PPKB (Persatuan Pergerakan Kaoem Boeroeh). Semaun merasa tidak puas terhadap ideologi CSI yang dianggap tidak mewakili kaum buruh, maka secara terang-terangan Semaun memproklamirkan ideologi pergerakan Sarekat Islam Semarang adalah berhaluan sosialis demokrat. Ideologi ini dianggap dapat menjadi pedoman bagi perubahan kehidupan buruh yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Indonesia tanpa kelas. Semaun menolak memasukkan unsur agama dalam gerakan SI Semarang. Atas inisiatif para anggota ISDV dan SI Semarang maka 23 Mei 1920 lahirlah Partai Komunis Hindia yang berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (Soe Hok Gie, 1990: 43).

Melalui organisasi-organisasi politik tersebut Semaun menyerukan dengan berbagai tulisan-tulisan di surat kabar serta diplomasi-diplomasi yang dilakukan atas nama Sarekat Islam. Tujuannya adalah agar pemilik modal memperhatikan kehidupan kaum buruh dan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak memihak rakyat. Di samping itu, Semaun menolak adanya *Volksraad* dan *Indie Weerbaar* yang dianggap tameng buatan Belanda.

LATAR BELAKANG BIDANG PENDIDIKAN

Awal abad ke-20 telah terjadi perkembangan baru dalam kebijakan politik kolonial Belanda. Zaman baru ini selanjutnya dikenal dengan politik etis. Ada tiga prinsip yang menjadi dasar kebijakan politik etis yaitu: pendidikan, perpindahan penduduk dan irigasi. Ketiga prinsip ini diharapkan mampu

untuk mengangkat kesejahteraan penduduk lokal yang selama ini hidup dalam keterpurukan di segala bidang. Tujuan politik etis bersifat ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal dan berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda.

Pemerintah menyadari kedua tujuan tersebut tak terpisahkan dan tujuan yang pertama hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah kolonial Belanda benar-benar mampu bertanggung jawab terhadap kemajuan penduduk lokal (Nagazumi, 1989: 28).

Politik etis memberikan kesempatan kepada kaum priyayi untuk mengenyam pendidikan. Sistem pendidikan yang diberlakukan terbagi atas pendidikan khusus untuk kaum pribumi dan pendidikan khusus untuk mereka yang masih memiliki status sebagai orang Eropa. Sementara itu, penduduk lokal yang bukan golongan bangsawan dan priyayi, kehidupannya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Mereka masih buta huruf dan mudah dibodohi untuk dieksploitasi. Potret ini menunjukkan bahwa politik etis gagal menembus kalangan masyarakat di pedesaan. Selain itu irigasi hanya untuk mengairi lahan perkebunan milik para pemodal.

Perluasan pendidikan model Barat merupakan simbol resmi dari politik etis yang salah satu programnya, yaitu melaksanakan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya untuk mendidik penduduk lokal tetapi untuk mempermudah mendapatkan tenaga kerja berketerampilan dengan upah yang murah. Selain itu, untuk menuntun ke arah modernitas dan persatuan Timur dan Barat (penduduk lokal dan Belanda). Tujuannya adalah membelandakan penduduk di kawasan Hindia Belanda (Shiraishi, 1997:37; Ricklefs,

2005: 329-330).

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terlihat pada pelaksanaan pendidikan misalnya, dalam hal pendirian sekolah, khususnya sekolah dasar. Sekolah dasar untuk kaum pribumi pada tingkat rakyat biasa terdapat "Sekolah Kelas Dua" yang lama pendidikannya 2 sampai 5 tahun dengan pengantar bahasa daerah. Sedangkan untuk anak-anak pegawai dan orang kaya "Sekolah Kelas Satu" yang lama pendidikannya 7 tahun. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Sekolah ini sering disebut HIS yang didirikan tahun 1914. Sekolah untuk anak Belanda adalah "Sekolah Rendah Eropa" atau ELS (*Europesche Lagere School*). Dalam perkembangannya, untuk memenuhi tenaga pengajar didirikanlah sekolah lanjutan MULO, dan AMS yang lama pendidikannya selama 3 tahun dan untuk HBS selama 5 tahun yang diperuntukan bagi siswa-siswa pilihan (Setyohadi, 2002: 9).

Pada tahun 1910, lulusan Sekolah Angka Satu dan Angka Dua yang berasal dari kalangan penduduk lokal sekitar 232.629 siswa, sehingga dapat ditarik garis lurus bahwa jumlah penduduk yang bisa berbahasa melayu hampir sama dengan jumlah lulusan tersebut. Sedangkan jumlah siswa lokal yang mampu meneruskan ke sekolah menengah, seperti STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) dan yang lainnya berjumlah 1.470 orang. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan lima kali lipat bila dibandingkan jumlah siswa pada tahun 1900 yang berjumlah 376 (Shiraishi, 1997:37).

Meningkatnya minat penduduk lokal pada pendidikan model Barat antara lain disebabkan oleh peningkatan ekspor Belanda yang mencapai dua kali lipat. Peningkatan ekspor mengha-

ruskan mereka menambah tenaga kerja baru yang terampil tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan dari pada mereka harus mendatangkan tenaga kerja profesional dari Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berpikir akan lebih efisien apabila mengoptimalkan tenaga lokal untuk mengisi kekosongan tersebut (Munasichin, 2005: 45-46).

Semaun merupakan bagian dari penduduk lokal yang hidup di zaman maraknya politik etis diperbincangkan. Usia Semaun saat itu baru 7 tahun. Semaun mengikuti pendidikan di Sekolah Kelas Dua "*Tweede Klas*" yang setaraf dengan Sekolah Dasar sekarang. Selain mengikuti pendidikan di *Tweede Klas*, Semaun mengikuti tambahan pelajaran di *Eerste Klas Inlansche School* yang kemudian dikenal dengan HIS (*Holland Inlansche School*). Karena kecerdasan dan keuletan Semaun maka, pada saat ia duduk di kelas VI diperbolehkan mengikuti ujian pegawai Pamong Praja tahun 1912 dan Semaun muda berhasil mendapatkan sertifikat.

Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan berhasil mendapatkan sertifikat "*Klein Ambtenaar*", Semaun tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alasannya jelas, biaya. Semaun kemudian bekerja di *Staatspoor* (SS) Surabaya sebagai seorang juru tulis (*Klerk*) kecil. Semaun diterima di jawatan kereta api setelah dinyatakan berhasil menempuh ujian "*pengetahoean oemoem*" (*Algemeene O u t w i k k e l i n g*) dan ujian "*Stationscommies*." Jadi pada usia 13 tahun Semaun kecil sudah terjun dalam dunia kerja (Soewarsono, 2000: 40).

Semaun walaupun sudah bekerja niat untuk belajar tidak surut. Otodidak itulah jalan yang ia pilih. Sikap dan sifat Semaun yang mudah bergaul memberikan nilai tambah bagi Semaun dalam menambah pengetahuannya melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Keteguhan dan ketekunannya terbayar saat Semaun berhasil memperoleh gelar Diploma A, yang kemudian disamakan dengan HBS (*Hollands Burger Schoolen*) atau sekolah tinggi bagi warga negara yang setara dengan sekolah menengah Belanda (Soe Hok Gie, 1990: 50). Sampai pada akhirnya Semaun bertemu dengan Sneevliet.

Semaun yang bukan berasal dari keturunan seorang "*Kadiroen*" bisa menempuh studi setinggi itu (Semaun, 2000). Pencapaian tersebut belum membuatnya puas, belajar dan terus belajar itu yang dia lakukan. Kebiasaannya membaca buku sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuannya. Buku yang dia baca terutama berkaitan dengan masalah kemanusiaan.

Setelah bekerja ternyata Semaun merasa tidak puas, pikirannya selalu terganggu dengan keadaan masyarakat yang tertindas. Panggilan hati membuatnya berhenti dari pekerjaannya dan Semaun muda lebih memilih untuk melibatkan diri dalam dunia pergerakan. Tampaknya Semaun sudah menempatkan pilihan untuk bersama orang-orang malang dan memperjuangkan mereka yang berada dalam belenggu kapitalisme. Jalan yang dipilihnya adalah melalui Partai Komunis Indonesia yang dia sendiri bertindak sebagai salah satu pelopornya (Ruth T McVey, 1965). Terlepas dari jalan yang menjadi pilihannya, Semaun menjadi salah seorang tokoh pergerakan yang militan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Semaun hidup dalam bayang-bayang kolonial Belanda. Diskriminasi secara politik, ekonomi, sosial dan pendidikan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai

anak bangsa jajahan, Semaun tidak lemah, namun sebaliknya dalam segala keterbatasan dia berjuang dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dialami masyarakat di Hindia Belanda. Kesadaran sosiologis Semaun lambat laun terbentuk yang diiringi dengan kesadaran politis, sehingga ia memutuskan untuk bergerak dan berjuang bagi kaum buruh. Pergerakan Semaun dilakukan di bawah sistem yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey, Pater. 2004. *Asal Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*. Yogyakarta: LkiS.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gie, Soe Hok. 1990. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Jakarta: Frantz Fanon Foundation.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- McVey, Ruth. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Munasichin, Zainul. 2005. *Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*. Yogyakarta: LkiS.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Grafiti.
- Onghokham. "Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Semaun. 2000. *Hikajat Kadiroen*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soewarsono. 2000. *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaun*. Yogyakarta: LkiS.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulistyo, Bambang. 1995. *Pemogokan Buruh Sebuah kajian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suwarno, P.J. 2004. *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Super Semar)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Setyohadi, Tuk. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Rajawali Corporation.
- Yuliati, Dewi. 2000. *Semaun, Pers Bumi-putera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera.